

MENAKAR PENGARUH POLITIK DINASTI DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

Halilul Khairi

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Sumedang, Indonesia

E-mail: halilulkhairi@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah yang terkait dengan dinasti politik. Penelitian ini juga akan menggambarkan tipe patron yang efektif dalam mempengaruhi kemenangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menghitung persentase dari setiap parameter yang diamati. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menganalisis data hubungan calon yang terkait dinasti politik dengan patronnya. Gejala politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu sejak pemilihan kepala daerah langsung pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2005. Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 terjadi di 29 provinsi dari 32 provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, dengan jumlah pasangan calon yang terkait dengan politik dinasti mencapai 135 pasangan calon atau 16,8 % dari total 804 pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sebanyak 58 pasangan calon politik dinasti atau sebesar 42,96 % terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020, dan sisanya 77 pasangan calon tidak terpilih. Calon kepala yang paling banyak terpilih adalah calon politik dinasti yang mempunyai hubungan anak/menantu, suami/isteri dan kakak/adek dengan patron politik dinastinya yaitu mencapai 51 pasangan calon atau sebanyak 88 % dari calon politik dinasti yang terpilih.

Kata kunci: Politik Dinasti; Patron; Kepala Daerah; Pemilihan Kepala Daerah

MEASURING THE INFLUENCE OF POLITICAL DYNASTIES IN LOCAL HEAD ELECTION IN INDONESIA

ABSTRACT. The purpose of this research is to gain knowledge and descriptions of the phenomena and practices of dynasty politics in Indonesian regional head elections. The primary research question in this study is whether dynastic politics has an impact on the electability of candidates in regional head elections, as well as to learn more about the criteria that characterize the electability of regional head candidates in relation to dynasty politics. This study employed a descriptive quantitative technique, determining the proportion of each parameter observed. A qualitative technique is also utilized to study data on candidates associated with political dynasties and their backers. Since the first direct regional head elections in Indonesia in 2005, there has been an increase in the prevalence of dynastic politics in regional head elections. The dynastic politics in the 2020 regional head elections happened in 29 of the 32 provinces that hosted regional head elections, with a total of 135 candidate pairs or 16.8 percent of the total 804 candidate pairs participating in the 2020 regional head election. In the 2020 regional head election, 58 dynastic political candidate pairs, or 42.96 percent, were elected, while the remaining 77 pairs of candidates were not elected. The most elected head candidates were dynastic political candidates who had children/son-in-law, husband/wife, and brother/sister relationships with their dynastic political patrons, with 51 pairs of candidates chosen, accounting for up to 88 percent of all elected dynastic political candidates.

Keywords: Political Dynasties; Patron; Local Head; Election

PENDAHULUAN

Politik dinasti lazim digunakan untuk merujuk kepada sistem pengangkatan pemimpin pemerintahan pada pemerintahan yang berbentuk monarki atau kerajaan (Nasroen, 1986, p. 97), dimana kepemimpinan pemerintahan berasal dari keturunan raja secara turun temurun tanpa ada keterlibatan atau pemilihan dari rakyat. Dalam negara yang menganut paham politik demokrasi, konsep politik dinasti tidak dikenal dan pengangkatan seorang kepala pemerintahan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga politik dinasti tidak dikenal dan tidak datur dalam sistem hukum dan sistem politik di Indonesia, kecuali

untuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Demokrasi meletakkan kekuasaan dan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat dan seluruh pengelolaan kehidupan negara harus atas kehendak dan persetujuan rakyat (Dye & Zeigler, 2008, p. 74).

Konstitusi Indonesia tidak melarang warga negara untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik lokal dan nasional. Tetapi dengan politik dinasti justru melemahkan demokrasi karena cenderung mengabaikan rekam jejak dan kompetensi (George & Ponattu, 2018). Demokrasi secara ideal mengakomodir politik dinasti karena mengedepankan kesetaraan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi (Schubert et al., 2015), namun politik dinasti bukanlah sistem yang tepat diterapkan pada negara demokratis melainkan tepat pada

negara monarki sebagaimana kasus Daerah Khusus Yogyakarta (Fadilah et al., 2020).

Beberapa pakar menganggap bahwa politik dinasti dapat menyuburkan perilaku koruptif karena hal tersebut mengakomodir pelaksanaan kekuasaan politik hanya dilakukan oleh sekelompok orang yang berhubungan keluarga (George & Ponattu, 2018; Muksin et al., 2019; Pratama, 2017). Dengan demikian terdapat kecenderungan untuk menyuburkan dinasti politik untuk mencegah pengalihan kekuasaan politik oleh lawan politik penguasa. Sementara disisi lain, terdapat pakar yang mengatakan bahwa dinasti politik merupakan hal yang lumrah terjadi di negara-negara lain bahkan dengan sistem demokrasi yang lebih matang dibandingkan dengan Indonesia seperti Amerika Serikat (Fatimatuzzahra et al., 2021; Tamiki, 2019). Amerika Serikat praktek politik dinasti hingga saat ini masih terjadi dimana keluarga Kennedy, Clinton, dan Bush masih memiliki pengaruh politik yang kuat dan dihormati, baik di negara bagian maupun di federal.

Era reformasi telah memberikan hak demokrasi yang lebih besar kepada rakyat. Melalui amandemen UUD 1945, pemilihan presiden yang sebelumnya dilakukan oleh MPR diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat, begitu juga dengan pemilihan kepala daerah yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD telah diserahkan langsung kepada rakyat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan langsung oleh rakyat diharapkan akan menghasilkan pemimpin yang kebijakan dan tindakannya diabdikan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat yang memilihnya. Rakyat diberikan hak untuk menilai sendiri para calon pemimpin yang akan dipilih untuk mengurus urusan publiknya.

Pemilihan kepala daerah langsung telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan sejak saat itu telah lahir ribuan kepala daerah pilihan rakyat. Sistem pemilihan demokratis dan langsung dalam pemilihan kepala daerah ini telah memunculkan fenomena baru yang disebut dengan fenomena politik dinasti (Arif & Kawuryan, 2021). Fenomena politik dinasti merupakan fenomena dimana kepala daerah pada suatu daerah dijabat secara bergantian dari dalam satu keluarga, misalnya dari bapak ke anak, isteri, menantu, keponakan, atau kepada anggota keluarga dekat lainnya.

Fenomena politik dinasti dalam politik demokrasi modern tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi diberbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Italia, Norwegia, Philipina dan belahan dunia lainnya (George & Ponattu, 2018, p. 11). Tetapi fenomena tersebut dalam konteks demokrasi modern berkaitan dengan keterpilihan kandidat berdasarkan tingkat Pendidikan dan pengalaman perpolitikan seperti yang

terjadi di Italia dan Amerika Serikat (Fiva & Smith, 2018, pp. 4–5). Kondisi di Italia dan Amerika Serikat merupakan kondisi ideal politik kekerabatan atau politik keluarga yang kemudian diistilahkan sebagai dinasti politik. Fenomena politik dinasti dan dinasti politik terdapat di lebih dari 145 negara di seluruh dunia (George & Ponattu, 2018, p. 8).

Clubok, Wilensky and Beghorn dalam Guritno mengelompokkan tiga bentuk politik dinasti yaitu; pertama, bentuk yang lebih lunak, yaitu dengan mendorong keluarga petahana untuk ikut merebut kekuasaan secara demokratis (Guritno & Samudro, 2018, p. 4). Dalam bentuk ini, politik dinasti mengikuti seluruh prosedur demokrasi dan peraturan yang berlaku secara wajar (*fair*). Kedua, pengkaderan politik, bentuk kedua ini dilakukan dengan mempersiapkan dan mendidik anggota keluarganya untuk mengikuti kompetisi politik pada masa yang akan datang. Bentuk politik dinasti ini lebih menekankan kepada kematangan dan kemampuan anggota keluarga yang dipersiapkan secara matang dalam kurun waktu yang cukup panjang, dan tidak hanya sebatas mengandalkan garis keturunan atau populeritas petahana atau patron. Ketiga, bentuk lebih otoriter, dimana terjadi pengkondisian agar tidak ada kandidat lain yang maju menjadi pesaing yang setara. Bentuk ini dilakukan melalui rekayasa politik pada saat pencalonan agar pemilih tidak ada pilihan lain, sehingga pemilih terpaksa memilih calon yang dipersiapkan oleh petahan.

Jaweng dalam Guritno membagi tiga tipe politik dinasti yaitu: pertama, regenerasi dinasti, dimana anggota keluarga meneruskan kepemimpinan di daerah yang sama dengan patronnya; kedua, dinasti lintas kamar, dimana dinasti dilakukan dengan cara menempatkan anggota keluarga pada lembaga legislatif dan eksekutif pada daerah yang sama. Ketiga, dinasti lintas daerah, dimana anggota keluarga menjadi kepala daerah di daerah lain baik dalam provinsi yang sama maupun pada provinsi yang berbeda (Guritno & Samudro, 2018, pp. 4–5). Politik dinasti juga dapat didefinisikan sebagai adanya sekelompok keluarga yang mendominasi kekuasaan pada daerah tertentu (Guritno & Samudro, 2018, p. 2).

Fenomena politik dinasti ini apabila dipandang dari sudut demokrasi bukanlah sesuatu yang salah, karena terpilihnya anggota keluarga kepala daerah untuk menggantikannya sebagai kepala daerah dilakukan secara demokratis atas pilihan bebas para pemilih dan dilakukan sesuai dengan mekanisme demokrasi serta hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tidak sedikit pemilih lebih memilih calon dari keluarga rezim berkuasa karena mereka tidak ingin lagi melakukan perjudian terhadap masa depan kehidupannya (Geys, 2017). Meskipun dari sisi demokrasi dan hukum politik dinasti ini bukan sesuatu

yang salah, namun gejala politik dinasti ini dipandang tidak baik oleh para ahli politik, karena *Pertama*, dianggap menghambat munculnya pemikiran dan gagasan baru dalam kepemimpinan pemerintahan. Kepala daerah yang berasal dari keluarga sama akan cenderung untuk mempertahankan status quo dan melanjutkan gagasan dan pemikiran kepala daerah sebelumnya, sehingga kurang baik bagi lahirnya inovasi dan kreativitas yang berkesinambungan. *Kedua*, gejala politik dinasti juga dipandang sebagai penghambat tumbuhnya pemimpin yang berkualitas dan inovatif, karena politik dinasti lebih cenderung menggunakan popularitas dalam menentukan pilihan pemimpin pemerintahan dari pada menggunakan kapasitas dan kapabilitas calon.

Politik dinasti dianggap sebagai upaya orang tertentu untuk menguasai pemerintahan dan berpotensi menjadi lahan tumbuhnya praktek korupsi dalam pemerintahan dan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah tersebut. Penolakan terhadap politik dinasti juga didasarkan pada fakta bahwa politik dinasti tidak membawa kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain yang tidak mengalami politik dinasti (Guritno & Samudro, 2018, p. 13). Dalam konteks meningkatkan keterpilihan perempuan dalam jabatan publik berbasis pemilihan (*elected position*), politik dinasti mempunyai peranan yang positif (Wardani & Subekti, 2021, p. 9), karena terdapat calon legislatif yang terpilih dilatarbelakangi oleh adanya politik dinasti.

Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terdapat 270 daerah (9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 Kota) yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Menurut Nagara Institut jumlah pasangan kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 naik dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 sebanyak 86 pasangan calon (Fadilah et al., 2020).

Fenomena politik dinasti ini sudah pernah dilarang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pelarangan bagi anggota keluarga kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah adalah inkonstitusional, sehingga politik dinasti tetap berlangsung sampai saat ini.

Fenomena politik dinasti ini merupakan cerminan kualitas politik masyarakat dan merupakan gejala sosial yang lazim dalam perkembangan budaya dan peradaban masyarakat. Cara lahirnya seorang pemimpin tidak terlepas dari kondisi pengikutnya. Masyarakat yang memegang budaya paternalistik dan tradisional akan cenderung untuk memilih

pemimpin yang kharismatik, mengayomi dan dekat dengan kehidupan masyarakat (Guritno & Samudro, 2018). Hal ini diperkuat dengan perilaku partai politik yang tidak memperdulikan dampak negatif dari politik dinasti terhadap kaderisasi partai selama kekuasaan partai kuat hingga pada tingkat lokal (Fiva & Smith, 2018; Witianti & Hendra, 2019).

Pada masyarakat budaya paternalistik ini, kecerdasan dan kecakapan bukanlah faktor utama dalam menentukan seseorang menjadi pemimpin. Sementara pada masyarakat modern dengan budaya egaliter akan cenderung memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan kreativitas dalam penyelesaian masalah publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sebesar pengaruh politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah yang diukur dari tingkat keterpilihan terhadap calon kepala daerah yang terkait dengan dinasti politik. Penelitian ini juga akan menggambarkan tipe patron yang efektif dalam mempengaruhi kemenangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti.

Penelitian terkait politik dinasti telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai fokus dan hasil penelitian. Keterpilihan individu, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun legislatif, disebabkan adanya peran figur politik di tubuh partai politik maupun faktor kepala daerah (Aspinall & Uhaib, 2016; Tamiki, 2019; Wardani & Subekti, 2021). Selain itu hasil pemilihan dengan keturunan dinasti berakibat pada degradasi kualitas kepemimpinan karena mengandalkan basis suara pendahulunya sehingga kurang usaha dan kinerja (George & Ponattu, 2018), dan inefisiensi penggunaan sumber daya pemerintahan (Geys & Smith, 2017; Tamiki, 2019), tidak berjalannya fungsi partai politik sebagai laboratorium yang menyiapkan calon pemimpin politik (Fadilah et al., 2020), bahkan dapat mengakibatkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat (Mendoza et al., 2016), dan praktek korupsi (Tadem, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh (Tamiki, 2019) tentang gerakan publik untuk menolak politik dinasti juga terjadi di Philipina, penghapusan politik dinasti dipandang sebagai upaya untuk melakukan reformasi politik dan pemerintahan di Philipina. Sri Budi Eko Wardani and Valina Singka Subekti melakukan penelitian tentang peranan politik dinasti dalam keterpilihan calon legislatif perempuan dalam pemilihan umum legislative (Wardani & Subekti, 2021). Adelia Putri melakukan penelitian fenomena politik dinasti pada pemerintahan lokal dengan metode kualitatif memfokuskan penelitiannya pada gejala munculnya gejala politik lokal di daerah dengan menyoroti beberapa kasus (Fitri, 2019).

Kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian terdahulu belum ada yang memfokuskan

penelitiannya pada tingkat keterpilihan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti di Indonesia, serta belum ada juga penelitian yang menganalisis tingkat keterpilihan calon kepala daerah terkait dinasti politik berdasarkan hubungan kekerabatan antara calon dari politik dinasti dengan patronnya. Penelitian ini difokuskan pada tingkat keterpilihan calon kepala daerah dari politik dinasti dan peranan hubungan kekerabatan calon dari politik dinasti dengan patronnya terhadap tingkat keterpilihan calon politik dinasti tersebut dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif sehingga menggunakan analisis statistik dengan basis data sekunder. Unit analisis adalah calon kepala daerah pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari berbagai dokumen baik laporan pemilihan kepala daerah, berita media, hasil penelitian, dan sumber data lainnya.

Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) hanya didefinisikan hubungan keluarga calon kepala daerah dengan petahana (*incumbent*), namun dalam penelitian ini definisi operasional dari politik dinasti diperluas tidak hanya sebatas hubungan keluarga calon kepala daerah dengan petahana, melainkan politik dinasti didefinisikan sebagai hubungan keluarga antara calon kepala daerah dengan pejabat politik (*elected position*) yaitu presiden, menteri, kepala daerah, anggota DPR/DPD RI, dan Anggota DPRD. Definisi operasional dari hubungan keluarga juga diperluas tidak hanya hubungan ke atas (bapak/ibu), ke bawah (anak/menantu) dan ke samping (saudara) namun melainkan mencakup bentuk hubungan keluarga yang mencakup bapak/ibu, anak, adik/kakak, ipar, paman/keponakan, dan cucu.

Analisis dilakukan dengan menghitung persentase keterpilihan calon kepala daerah terkait dinasti dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Analisis juga dilakukan dengan menghitung tingkat keterpilihan calon kepala daerah terkait dinasti berdasarkan tipe hubungannya dengan patron. Analisis terhadap faktor geografis dilakukan dengan menggunakan tingkat keterpilihan calon kepala daerah terkait dinasti berdasarkan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Diantara 270 daerah yang menyelenggarakan

pemilihan kepala daerah terdapat 16 daerah yang harus melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berdasarkan hasil akhir setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

a. Jumlah Calon Kepala Daerah terkait Politik Dinasti

Dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 terdapat 804 pasang calon kepala daerah, dan sebanyak 135 calon kepala daerah atau sebanyak 16,8 % terkait dengan politik dinasti. Adapun 135 Calon kepala daerah terkait politik dinasti berdasarkan kategori jabatan gubernur, bupati dan walikota kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Calon Kepala Daerah terkait Politik Dinasti di Provinsi, Kabupaten dan Kota

No	Daerah	Jumlah	%
1	Gubernur/wakil gubernur	6	4,4
2	Bupati/wakil bupati	97	71,9
3	Walikota/wakil walikota	32	23,7
Jumlah		135	100

Sumber: (nn, 2020)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah calon kepala daerah yang terkait politik dinasti terbanyak ada di kabupaten, kemudian disusul kota dan terakhir provinsi. Jumlah ini selaras dengan jumlah kabupaten yang melaksanakan pemilihan bupati mencapai 224 kabupaten, sedangkan jumlah kota yang melaksanakan pemilihan walikota sebanyak 37, dan jumlah provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur sebanyak 9 provinsi.

Namun apabila dilihat dari proporsi daerah yang mempunyai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti relatif tidak jauh berbeda antara provinsi, kabupaten dan kota, Pada pemilihan gubernur terdapat 6 daerah provinsi atau 66,6 % daerah yang mempunyai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti dari 9 daerah provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pada pemilihan bupati terdapat 83 kabupaten atau 37 % yang mempunyai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti dari 224 daerah kabupaten yang melaksanakan pemilihan. Pada pemilihan walikota terdapat 21 kota atau 56,7 % daerah kota yang mempunyai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti dari 37 daerah kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Data ini menunjukkan bahwa politik dinasti sudah menjadi gejala umum dan bahkan dapat disebut sudah menjadi budaya dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan umum legislatif. Pada lembaga legislatif

politik dinasti juga sangat tinggi, sebagai contoh, dari 120 calon anggota DPR RI perempuan hasil pemilihan umum 2014 terdapat 53 anggota legislatif perempuan terpilih yang terkait dengan politik dinasti (Wardani & Subekti, 2021). Penggunaan dan pendekatan kekuasaan menjadi cara yang dipandang efektif untuk membawa keluarga masuk ke dalam kekuasaan dan sekaligus meng-amankan keberlangsungan kekuasaan di daerah tersebut (Pratama, 2017). Berkembangnya politik dinasti baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pemilihan anggota legislatif menunjukkan bahwa orientasi dan pertimbangan pemilih masih dapat dipengaruhi oleh popularitas dan nama besar keluarga calon, meskipun popularitas dan nama besar calon belum menjamin kemampuan calon untuk memimpin dan membawa kemajuan bagi daerah tersebut (Fiva & Smith, 2018; Guritno & Samudro, 2018).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Guritno dkk pada 12 kabupaten/kota menunjukkan bahwa politik dinasti tidak mampu menurunkan angka kemiskinan (Guritno & Samudro, 2018, p. 13). Penelitian Guritno dkk juga menunjukkan bahwa politik dinasti berkaitan erat dengan kemiskinan. Daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung menjadi tempat tumbuhnya politik dinasti (Guritno & Samudro, 2018). Meskipun tidak semua politik dinasti terjadi di daerah dengan kemiskinan yang tinggi (Mendoza et al., 2016).

Fenomena politik dinasti yang berkembang pesat setelah adanya pemilihan langsung oleh rakyat merupakan suatu hal yang menarik. Pemilihan langsung diharapkan memberikan ruang kepada pemilih sebagai pemilik kedaulatan dan sekaligus sebagai konsumen jasa layanan pemerintahan untuk menentukan “pelayan” yang terbaik untuk mengelola pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Lahirnya kepala daerah hasil pilihan rakyat dari politik dinasti yang terbukti tidak mampu memberikan pelayanan dan pembangunan yang terbaik dibandingkan dengan daerah lain telah menimbulkan paradok demokrasi. Di satu sisi demokrasi yang berlandaskan kepada kebebasan warga negara untuk menentukan pemimpinnya merupakan prinsip dasar yang diyakini sebagai cara adil dan akuntabel dalam menentukan pemimpin pemerintahan, namun disisi lain, kehadiran politik dinasti yang kurang mempertimbangkan aspek kemampuan calon dan lebih mengedepankan popularitas dan nama besar keluarga calon telah membawa kekhawatiran akan memperlambat pencapaian tujuan pembangunan dan penciptaan kemakmuran rakyat. Kepemimpinan politik dinasti yang berbasis popularitas kurang baik bagi lahirnya inovasi dan kreatifitas. Sementara disisi lain, kreativitas dan inovasi hanya akan lahir dari pemimpin yang mempunyai kemampuan intelektual,

kepribadian, wawasan, integritas dan budaya akademik yang baik (Guritno & Samudro, 2018; Tamiki, 2019).

Perkembangan fenomena politik dinasti ini dapat dilihat dari semakin meratanya sebaran calon kepala daerah yang terkait politik dinasti pada pemilihan kepala daerah tahun 2022. Jumlah calon politik dinasti pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya lebih banyak dimana anantara tahun 2005-2015 hanya terdapat 85 pasangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti (Nagara Institut, 2020). Dari 32 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah baik untuk gubernur, bupati dan walikota, terdapat 29 atau sebesar 90 % daerah provinsi mempunyai calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti. Adapun rincian jumlah pasangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti pada masing-masing provinsi dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah Pasangan Calon Kepala Daerah yang terkait dengan Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

Provinsi	Jumlah Pasangan	Pasangan Dinasti	
		Jumlah	%
Sumatera Barat	113	4	3,5
Sumatera Selatan	13	4	30,7
Sumatera Utara	65	8	12,3
Riau	34	4	11,7
Kepulauan Riau	17	4	23,5
Bengkulu	26	2	7,6
Bangka Belitung	11	3	27,7
Jambi	15	5	33,3
Lampung	23	4	17,3
Banten	11	8	72,7
Jawa Barat	28	4	14,2
Jawa Tengah	41	15	36,5
DI Yogyakarta	9	2	22,2
Jawa Timur	42	11	26,2
Bali	11	3	27,2
Nusa Tenggara Barat	23	8	34,7
Nusa Tenggara Timur	27	2	7,4
Kalimantan Barat	23	1	4,3
Kalimantan Selatan	21	2	9,5
Kalimantan Tengah	6	1	16,6
Kalimantan Timur	20	4	20
Kalimantan Utara	16	2	12,5
Sulawesi Barat	8	4	50
Sulawesi Selatan	33	10	30,3
Sulawesi Tengah	27	5	18,5
Sulawesi Utara	24	7	29,1
Gorontalo	12	4	33,3
Sulawesi Tenggara	18	0	0
Maluku	11	1	9
Maluku Utara	23	3	13
Papua	34	0	0
Papua Barat	19	0	0

Sumber: (nn, 2020)

Data di atas menunjukkan bahwa hampir seperlima (16,8 %) pasangan kepala daerah terkait dengan politik dinasti. Daerah yang paling banyak mempunyai pasangan kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti adalah Provinsi Banten sebesar 72 % disusul Sulawesi Barat sebesar 50 % dan terdapat 3 provinsi yang tidak mempunyai pasangan kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti yaitu provinsi Sulawesi Tenggara, Papua dan Papua Barat.

b. Tipe Hubungan Patron Politik Dinasti

Tipe hubungan antara calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti sangat bervariasi mulai dari hubungan anak/menantu, susmi/isteri, adik/kakak, ipar, menantu dan lain sebagainya. Adapun tipe hubungan antara calon kepala daerah terkait politik dinasti dengan patronnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Tipe Hubungan Calon Kepala Daerah terkait Politik Dinasti dengan Patron Politiknya

Hubungan	Jumlah	%
Anak/Menantu	49	36,3
Suami/Isteri	43	31,8
Adik/Kakak	26	19,2
Ipar/Besan	8	6
Keponakan/Paman	8	6
Cucu	1	0,7
Jumlah	135	100

Sumber: (nn, 2020)

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, bahwa tipe hubungan antara calon kepala daerah dengan patronnya adalah hubungan anak/menantu sebesar 36,3 %, disusul oleh hubungan susmi/isteri sebanyak 31,8 %, hubungan adik/kakak sebanyak 19,2 %, hubungan ipar/besan dan keponakan/paman sebanyak 8 % serta hubungan cucu sebesar 0,7 %. Dari data tersebut terlihat bahwa hubungan anak/menantu dan isteri/suami mendominasi dalam pola politik dinasti pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hal ini dapat dipahami bahwa hubungan terdekat antara patron adalah dengan anak/menantu atau suami/isteri. Banyaknya anak/menantu dan isteri/suami yang mewarnai politik dinasti tidak terlepas dari upaya untuk mengamankan kebijakan dan tindakan dimasa lalu patron serta untuk meneruskan dan menjamin kesinambungan kebijakan dimasa yang akan datang. Anak/menantu dan suami/isteri diyakini paling dapat dipercaya untuk mengamankan kebijakan dan tindakan masa lalu patron (Solihah, 2019).

c. Jabatan Patron dalam Politik Dinasti

Jabatan atau kedudukan patron atau elit dalam politik dinasti juga beragam mulai dari jabatan presiden, wakil presiden, menteri, anggota DPR RI, anggota DPD RI, gubernur, bupati/walikota dan ketua/anggota DPRD. Kedudukan patron atau elit keluarga yang berkuasa akan menentukan hubungan antara calon dari politik dinasti dalam mempengaruhi dan meyakinkan pemilih (Muksin et al., 2019). Analisis kekuasaan patron akan dapat mempengaruhi alokasi sumber daya atau pengaruh pada masyarakat pemilih. Mengidentifikasi kedudukan patron calon dalam pemerintahan akan membantu menjelaskan relasi calon dengan partai pendukung dan dengan tokoh masyarakat atau elit lokal dalam memberikan dukungan terhadap calon. Adapun rincian jabatan patron dalam politik dinasti dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Jabatan Patron Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah

Hubungan	Jumlah	%
Presiden/ Mantan Presiden	3	2,2
Wakil Presiden/Mantan Wapres	3	2,2
Menteri	8	6
Anggota DPR RI/DPD RI	13	9,6
Gubernur	10	7,4
Bupati/walikota	85	63
DPRD	13	9,6

Sumber: (nn, 2020)

Jabatan Patron dalam politik dinasti didominasi oleh jabatan bupati/walikota sebesar 63 %, disusul oleh anggota DPRI/DPD RI dan DPRD masing-masing 9,6 %, diikuti oleh gubernur sebesar 7,4 persen. Banyaknya patron yang belatar belakang bupati/walikota dapat disebabkan oleh jumlah bupati/walikota lebih banyak dibandingkan posisi lainnya seperti presiden, menteri, dan gubernur. Namun faktor faktor yang paling utama adalah karena bupati/walikota mempunyai pengaruh yang lebih kuat dan mengakar ke masyarakat di daerahnya (Aspinall & Uhaib, 2016; Muksin et al., 2019). Faktor lain yang menyebabkan banyaknya patron politik dinasti dari kalangan bupati/walikota tidak terlepas dari kemampuan keuangan untuk membiayai prosesi pemilihan kepala daerah yang membutuhkan anggaran yang sangat besar (Tadem, 2016). Faktor ini pula yang mengakibatkan jumlah patron dari kalangan DPRD jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan bupati/walikota, meskipun jumlah pimpinan DPRD jauh lebih banyak dari bupati/walikota. Pengaruh pimpinan DPRD tidak sekuat dan tidak seluas pengaruh bupati/walikota, begitu juga dalam kemampuan penyediaan keuangan untuk mendukung prosesi pemilihan kepala daerah. Pimpinan DPRD memiliki pengaruh yang kuat

pada daerah pemilihan yang diwakilinya, namun tidak mencakup seluruh wilayah di daerah tersebut. Pimpinan DPRD juga tidak mempunyai akses terhadap sumber daya keuangan baik melalui pengelolaan APBD maupun melalui relasi dengan pihak swasta atau investor.

Bupati/walikota mempunyai peluang untuk menanamkan persepsi dan pengaruh yang kuat ditengah masyarakat karena selama kepemimpinannya mempunyai kesempatan yang luas dan mendalam melalui interaksi sosial dan melalui pemberian bantuan serta pelaksanaan program yang langsung diterima masyarakat (Mukti & Rodiyah, 2020; Pratama, 2017).

d. Kemenangan Calon Politik Dinasti

Berdasarkan hasil Keputusan Komisi Pemilihan Umum atas hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 termasuk hasil pemilihan kepala daerah ulang diperoleh hasil bahwa dari 135 calon kepala daerah terkait politik dinasti yang memperoleh kemenangan sebanyak 58 pasangan atau sebesar 42,96 % dan yang kalah sebanyak 77 pasangan atau sebesar 57,04 %. Jumlah calon kepala daerah terkait politik dinasti yang kalah lebih banyak dari yang menang, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh politik dinasti masih berpengaruh untuk menjamin keterpilihan seorang calon terpilih menjadi kepala daerah. Dari data tersebut menunjukan bahwa hampir separoh calon kepala daerah terkait keluarga inkamben mampu memenangkan pemilihan kepala daerah. Jumlah itu belum memperhitungkan beberapa calon kepala daerah terkait dinasti mencalon pada daerah yang sama, sehingga salah satu atau beberapa calon terkait politik dinasti pada daerah yang sama harus tersingkir. Kemenangan 58 pasang calon politik dinasti berarti bahwa pada pemilihan kepala daerah 2020 terdapat 21,4 % atau seperlima dari 270 daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dimenangkan oleh calon kepala daerah terkait dengan politik dinasti.

e. Kemenangan Calon Politik Dinasti berdasarakan Tingkatan Daerah

Pemilihan kepala daerah pada karakteristik daerah yang berbeda dapat menghasilkan tingkat keterpilihan yang berbeda pula. Pemetaan kemenangan calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti berdasarkan tingkatan pemerintahan akan memberikan infmasi bagaimana rakyat memberikan respon terhadap kepala daerah terkait dinasti di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Karakteristik kota yang berbeda dengan kabupaten dapat menghasilkan respon pemilih yang berbeda pula terhadap calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti. Kemenangan calon kepala daerah terkait politik dinasti berdasarkan tingkatan daerah pemilihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Persentase Kemenangan Calon Kepala Daerah Politik Dinasti berdasarkan Tingkat Daerah Pemilihan

Daerah	Jumlah Calon	Calon Terpilih	
		Jumlah	%
Provinsi	6	2	33,3
Kabupaten	97	46	47,4
Kota	32	10	31,2

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (diolah)

Kemenangan calon kepala daerah terkait politik dinasti terbesar diraih di kabupaten, dimana 46 pasang calon atau sebesar 47,4 % dari 97 pasangan calon bupati terkait politik dinasti meraih kemenangan. Pada tingkat provinsi pasangan calon gubernur dari politik dinasti yang meraih kemenangan sebanyak 2 pasang calon atau sebsar 33,3 % dari 6 pasang calon yang terkait dengan politik dinasti. Pada tingkat kota pasangan calon yang terkait dengan politik dinasti yang meraih kemennagan sebanyak 10 pasangan calon atau 31,2 % dari 32 pasanga calon walikota yang terkait dengan politik dinasti. Tingkat kemenangan yang tinggi pada kabupaten berkaitan dengan tingkatan pendidikan, ekonomi dan akses informasi di kabupaten yang lebih rendah dari kota. Kondisi kemiskinan yang lebih tinggi di desa atau kabupaten dapat mennjadi faktor yang mempengaruhi tingginya kemenangan calon kepala daerah terkait politik dinasti di kabupaten (Guritno & Samudro, 2018).

f. Kemenangan Calon Politik Dinasti berdasarkan Tipe Hubungan Patron

Kemenangan calon kepala daerah terkait politik dinasti dapat pula dilihat dan dihubungkan dengan hubungan patron dengan calon kepala daerah. Hubungan tersebut akan mempengaruhi dukungan patron kepada calon dan sebaliknya pola hubungan antara calon kepala daerah dan patron juga akan mempengaruhi kepercayaan pemilih terhadap calon kepala daerah. Adapun persentase kemenangan calon dinasti poltik berdasarkan hubungan dengan patron dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Persentase Kemenangan Calon Kepala Daerah Politik Dinasti berdasarkan Tipe hubungan dengan Patron

Hubungan	Jumlah Calon	Calon Terpilih	
		Jumlah	%
Anak/Menantu/Orang Tua	49	27	55
Suami/Isteri	43	13	30
Adik/Kakak	26	11	42
Ipar/Besan	8	1	12
Keponakan/Paman	8	6	75
Cucu	1	0	0
Jumlah	135	58	42,96

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase calon yang meraih kemenangan dibandingkan dengan jumlah calon pada masing-masing tipe hubungan diperoleh oleh calon yang mempunyai hubungan keponakan/paman. Pada hubungan tipe keponakan terdapat 6 calon atau 75 % dari 8 calon yang meraih kemenangan. Porsi terbesar berikutnya adalah tipe hubungan anak/memantu/orang tua, dimana terdapat 27 pasang calon atau sebesar 55 % dari 49 pasangan calon dalam hubungan anak/memantu/orang tua yang memperoleh kemenangan. Tipe hubungan yang meraih kemenangan berikutnya adalah adik/kakak, dimana 11 pasang atau 42 % dari 26 pasangan calon dengan tipe hubungan adek/kakak memperoleh kemenangan. Tipe hubungan yang juga memperoleh kemenangan yang cukup besar adalah hubungan suami/isteri, dimana terdapat 13 pasangan calon atau sebesar 30 % dari 43 pasang calon dalam hubungan suami/isteri yang memperoleh kemenangan. Sementara pada hubungan ipar/besar hanya terdapat 1 pasang calon yang meraih kemenangan dari 8 pasangan calon dalam hubungan ipar/besuan. Sedangkan dalam tipe hubungan cucu tidak ada yang memperoleh kemenangan.

Apabila dilihat dari kontribusi masing-masing tipe hubungan terhadap total calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti yang memperoleh kemenangan, maka porsi terbesar diraih oleh tipe hubungan anak/memantu/orang tua sebanyak 27 pasang atau 46,5 % dari 58 pasang calon yang meraih kemenangan. Porsi terbesar berikutnya adalah tipe hubungan suami/isteri sebanyak 13 pasang atau sebanyak 22,4 % dari 58 pasang calon yang memperoleh kemenangan. Urutan berikutnya adalah tipe hubungan adik/kakak sebanyak 11 pasang atau sebesar 18,9 % dari 58 pasangan calon yang memperoleh kemenangan. Di posisi selanjutnya adalah tipe hubungan keponakan sebanyak 6 pasang atau sebesar 10,3 % dari 58 pasang calon yang memperoleh kemenangan. Posisi terakhir adalah tipe hubungan ipar/besuan sebesar 1 pasang atau 1,7 % dari 58 pasangan calon yang memperoleh kemenangan. Dari seluruh calon kepala daerah politik dinasti yang memperoleh kemenangan diwarnai oleh tipe hubungan pada keluarga batih atau keluarga ini berupa hubungan anak, suami/isteri dan adik/kakak sebanyak 51 pasangan calon atau sebesar 88 % dari total calon yang meraih kemenangan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pada 51 daerah tersebut dikuasai secara turun temurun oleh keluarga inti atau keluarga batih. Gejala tersebut menggambarkan beberapa hal, yaitu a) Dalam politik dinasti, penguasa atau elit yang berkuasa lebih mendukung dan lebih menghendaki penggantinya berasal dari keluarga inti atau keluarga batih. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan dalam menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan di

daerahnya. Dukungan yang tinggi dari elit yang berkuasa atau petahan terhadap keluarga batih disertai dengan dukungan sumber daya ekonomi, keuangan dan pengaruh akan memberikan dampak yang maksimal terhadap perolehan suara pemilih untuk mendapat kemenangan (Fiva & Smith, 2018); b) Popularitas dan nama besar elit atau patron akan memberikan efek yang lebih terhadap pilihan pemilih untuk memilih calon yang berasal dari keluarga batih (Fadilah et al., 2020; Pratama, 2017; Witianti & Hendra, 2019). Keyakinan pemilih ini dikarenakan bahwa elit penguasa atau patron yang dikenal dan dipercaya oleh masyarakat diyakini dapat mengontrol dan mempengaruhi calon dari keluarga batih, serta sifat kepemimpinannya diyakini pemilih mengikuti sifat kepemimpinan keluarga batihnya.

g. Kemenangan Calon Politik Dinasti berdasarkan Jabatan Patron

Kemenangan calon politik dinasti juga dapat dilihat dari kedudukan dan jabatan Patron yang mendukungnya. Kedudukan jabatan patron akan memberikan gambaran apakah kedudukan patron dari calon kepala daerah terkait politik dinasti ini mempunyai pengaruh terhadap keterpilihannya dalam pemilihan kepala daerah. Adapun persentase kemenangan calon terkait politik dinasti berdasarkan jabatan patronnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Persentase Kemenangan Calon Kepala Daerah Politik Dinasti berdasarkan Jabatan Patron

Hubungan	Jumlah Calon	Calon Terpilih	
		Jumlah	%
Presiden/Mantan Presiden	3	3	100
Wakil Presiden/Mantan Wapres	3	0	0
Menteri/Mantan Menteri	8	1	12,5
Anggota DPR RI/DPD RI	13	5	38,4
Gubernur/Mantan Gubernur	10	6	60
Bupati/walikota/Mantan Bupati/Walikota.	85	36	42,3
DPRD	13	7	53,4

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (diolah)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa calon kepala daerah yang mempunyai patron dengan presiden/mantan presiden terpilih seluruhnya. Dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 terdapat tiga calon kepala daerah yang terkait dengan Presiden atau mantan presiden yaitu calon walikota Solo dan calon walikota Medan yang merupakan anak dan menantu Presiden Joko Widodo, serta calon bupati pacitan yang merupakan keponakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Ketiga calon yang terkait dengan presiden dan mantan presiden tersebut terpilih semuanya dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Sementara calon kepala daerah yang terkait dengan wakil presiden atau mantan

wakil presiden terdapat sebanyak 3 orang yaitu anak dan cucu Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin dan calon keponakan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketiga calon kepala daerah yang terkait dengan wakil presiden atau mantan wakil presiden tidak ada yang meraih kemenangan. Selanjutnya calon yang mempunyai keterkaitan dengan Menteri/Mantan Menteri hanya satu orang yang meraih kemenangan. Calon yang mempunyai keterkaitan dengan anggota DPR RI atau DPD RI hanya 5 pasang atau 38,4 % dari 13 pasang calon. Calon yang terkait dengan gubernur/mantan gubernur yang memperoleh kemenangan sebanyak 6 orang atau 60 % dari 10 calon. Adapun calon yang terkait dengan pimpinan DPRD yang memperoleh kemenangan mencapai 7 pasang atau 53,4 % dari 13 pasang calon. Calon yang terkait dengan bupati walikota yang memperoleh kemenangan mencapai 36 pasang atau 42,4 % dari 85 pasang yang maju.

Namun apabila dilihat dari proporsi kemenangan diantara calon kepala daerah terkait politik dinasti, maka jumlah yang paling banyak memperoleh kemenangan adalah calon yang terkait dengan bupati/walikota sebanyak 36 orang atau sebesar 62 % dari 58 calon yang meraih kemenangan, disusul calon yang terkait dengan DPRD sebanyak 7 orang, gubernur/mantan gubernur sebanyak 6 orang dan terkait dengan DPD RI/DPR RI sebanyak 6 orang dan terkait dengan Presiden/Mantan Presiden 3 orang.

Fenomena politik dinasti ini merupakan realitas dalam sebuah negara demokrasi. Dalam setiap masyarakat terdapat kelas sosial, termasuk dinegara demokrasi (Dye & Zeigler, 2008). Kelas sosial baik dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, dan keagamaan, sosial dan aspek lainnya. Kelas sosial telah melahirkan kelompok elit dan massa. Pada masyarakat demokrasi tersebut, pilihan massa tidak sepenuhnya pilihan bebas mereka sebagaimana dalam teori demokrasi, melainkan dipengaruhi oleh elit. Pilihan publik setiap orang, termasuk dalam pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh pengetahuannya tentang keputusan yang akan diambil dalam pemilihan calon kepala daerah tersebut, yang disebut sebagai teori *bounded rationality* (Simon, 1976). Pengetahuan dan preferensi massa sangat dipengaruhi oleh bagaimana elit memberikan informasi dan sugesti kepada massa.

Pejabat publik seperti presiden, menteri, gubernur, anggota DPR RI dan DPD RI, bupati/walikota merupakan kelompok elit yang menguasai akses terhadap informasi dan sumber daya. Pendapat mereka akan dipercaya dan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap calon kepala daerah. Ketokohan pejabat dan sepak terjangnya selama menjabat akan mempengaruhi kepatuhan

dan kepercayaan masyarakat kepadanya, termasuk dalam pemilihan calon kepala daerah yang didukung olehnya.

SIMPULAN

Politik dinasti merupakan gejala yang lazim terjadi di negara demokrasi modern manapun di belahan dunia. Gejala politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah semakin meningkat dari waktu ke waktu sejak pemilihan kepala daerah langsung dilaksanakan di Indonesia tahun 2005. Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 terjadi di 29 provinsi dari 32 provinsi, dengan jumlah pasangan calon yang terkait dengan politik dinasti mencapai 135 pasangan calon atau 16,8 % dari total 804 pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun 2020. Pada pemilihan gubernur terdapat 6 daerah provinsi atau 66,6 % daerah yang mempunyai calon gubernur/wakil gubernur yang terkait dengan politik dinasti dari 9 daerah provinsi yang melaksanakan pemilihan kepala daerah. Pada pemilihan bupati terdapat 83 kabupaten atau 37 % yang mempunyai calon bupati/wakil bupati yang terkait dengan politik dinasti dari 224 daerah kabupaten yang melaksanakan pemilihan. Pada pemilihan walikota terdapat 21 kota atau 56,7 % daerah kota yang mempunyai calon walikota/wakil walikota yang terkait dengan politik dinasti dari 37 daerah kota yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Sebanyak 58 pasangan calon atau 42,96 % calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti terpilih dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Calon kepala yang paling banyak terpilih adalah yang mempunyai hubungan anak/menantu, suami/isteri dan kakak/adek dengan patron dengan jumlah mencapai 51 pasangan calon atau sebanyak 88 % dari calon politik dinasti yang terpilih. Calon kepala daerah yang terkait dengan politik dinasti yang paling banyak terpilih adalah calon bupati/wakil bupati sebanyak 46 pasang calon bupati atau 47,4 % dari 97 pasang calon bupati/wakil bupati yang terkait dengan politik dinasti. Dilihat dari hubungan calon kepala daerah dengan jabatan patronnya, maka jumlah calon yang paling banyak terpilih adalah yang mempunyai hubungan patron dengan bupati/walikota sebanyak 36 pasang calon dari 58 pasang calon politik dinasti yang terpilih.

Dalam proses demokrasi, gejala politik dinasti tidak perlu dihambat atau dilarang, karena pada akhirnya pilihan terhadap pemimpin bergantung pada kehendak rakyat pemilih. Namun ditengah kondisi kontrol sosial masyarakat yang belum kuat, maka untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh penguasa untuk memenangkan keluarganya, sebaiknya kepala daerah yang keluarganya mencalonkan diri

menjadi kepala daerah di wilayah kekuasaannya diwajibkan untuk cuti sampai pemungutan suara selesai dilaksanakan. Dalam rangka memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang fenomena politik dinasti di Indonesia, kepada para peneliti berikutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keterpilihan calon yang terkait dengan politik dinasti.

Tantangan kajian selanjutnya terkait politik dinasti adalah seluas apa gurita politik dinasti menguasai perebutan akses elektoral, baik di ranah eksekutif maupun legislatif dalam struktur kekuasaan vertikal maupun horizontal. Selain itu, lebih menarik juga menelaah bagaimana menjelaskan relasi dan strategi patronase yang dilakukan sampai akhirnya terbentuk sebuah jaringan atau konfigurasi politik dinasti, termasuk dalam pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A., & Kawuryan, M. W. (2021). Memikirkan Kembali Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 73–85. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10071>
- Aspinall, E., & Uhaib, M. (2016). Understanding family politics : Successes and failures of political dynasties in regional Indonesia. *South East Asia Research*, 1–16. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659571>
- Dye, T. R., & Zeigler, H. (2008). *The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics* (14th ed.). Cengage Learning.
- Fadilah, D. N., Ramadhan, F., & Dewa, T. T. (2020). *Dinasti Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. <https://nagarainstitute.com/riset-nagara-institute-dinasti-politik-dalam-pemilihan-kepala-daerah-tahun-2020/>
- Fatimatuzzahra, N., Suluh, D., & Dewi, K. (2021). The Pattern of Joko Widodo ' s Political Dynasty Practices. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 4(1), 1–12.
- Fitri, A. (2019). Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal. *KEMUDI : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 91–111. <https://doi.org/10.31629/kemudi.v4i1.1333>
- Fiva, J. H., & Smith, D. M. (2018). Letter Political Dynasties and the Incumbency Advantage in Party-Centered Environments. *American Political Science Review*, 1–7. <https://doi.org/10.1017/S0003055418000047>
- George, S. E., & Ponattu, D. (2018). Like Father , Like Son ? The Effect of Political Dynasties on Economic Development. *Proceedings*. https://scholar.harvard.edu/files/sid_dynasties_draft_17nov2018.pdf
- Geys, B. (2017). Political Dynasties, Electoral Institutions And Politicians ' Human Capital *. *The Economic Journal*, 127(October), 474–493. <https://doi.org/10.1111/eocj.12444>
- Geys, B., & Smith, D. M. (2017). Political Dynasties In Democracies : Causes, Consequences And Remaining Puzzles *. *The Economic Journal*, 127(October), 446–454. <https://doi.org/10.1111/eocj.12442>
- Guritno, D. C., & Samudro, B. R. (2018). The paradox of political dynasties of regeneration type and poverty in regional autonomy era. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2018-0069>
- Mendoza, R. U., Jr, E. L. B., Venida, V. S., Yap, D. B., Mendoza, R. U., Jr, E. L. B., Venida, V. S., & Yap, D. B. (2016). Political dynasties and poverty : measurement and evidence of linkages in the Philippines. *Oxford Development Studies*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1169264>
- Muksin, D., Purwaningsih, T., & Nurmandi, A. (2019). The practice of political dynasties at local level after reform: case study of politik abdul gani kasuba and ahmad hidayat mus in north maluku province elections. *Jurnal Wacana Politik*, 4(2), 133–144.
- Mukti, H. H., & Rodiyah, R. (2020). Dynasty Politics In Indonesia : Tradition Or Democracy? *Journal of Law and Legal Reform*, 1(3), 531–538.
- Nasroen, M. (1986). *Ilmu Perbandingan Pemerintahan*. Aksara Baru.
- nn. (2020). *Pilkada: Cari tahu kandidat terkait dinasti politik di wilayah Anda*. Bbcnews. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55140058>
- Pratama, R. A. (2017). Patronase dan Klientalisme pada Pilkada Serentak Kota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 33–45.
- Schubert, L., Dye, T. R., & Zeigler, H. (2015). *The Irony of Democracy* (7th ed.). Cengage Learning.
- Simon, H. A. (1976). Administrative behavior; a study of decision-making processes in administrative organization. In *Administrative behavior; a study of decision-making processes in administrative organization*. Macmillan.

- Solihah, R. (2019). Modal sosial Jeje-Adang dalam pilkada Kabupaten Pangandaran tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 30–43.
- Tadem, T. S. E. (2016). Political dynasties in the Philippines: Persistent patterns, perennial problems. *South East Asia Research*, 24(3), 328–340. <https://doi.org/10.1177/0967828X16659730>
- Tamiki, H. (2019). Defeating a Political Dynasty: Local Progressive Politics through People Power Volunteers for Reform and Bottom-up Budgeting Projects in Siquijor , Philippines. *Southeast Asia Studies*, 49(2), 413–439. <https://doi.org/10.20495/seas.8.3>
- Wardani, S. B. E., & Subekti, V. S. (2021). Political Dynasties and Women Candidates in Indonesia's 2019 Election. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 28–49. <https://doi.org/10.1177/1868103421991144>
- Witianti, S., & Hendra. (2019). Peran Ketua Umum Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia. *Jurnal Wacana Politik*, 4(1), 55–67.